



MUQODDIMAH

STATISTIK DAN PENGUKURAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Ibnussalam Harahap

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Jl.St.Mohd.Arief No.32 Padangsidempuan

Email : ibnussalamharahap@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui teknik mengukur kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan, 2. Untuk mengetahui gambaran tingkat kemiskinan masyarakat desa yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan, 3. Untuk mengetahui teknik mengukur tingkat ketimpangan dan sebaran kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan, 4. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan dan sebaran kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan ?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan ada dua yakni (1) desain *cross-sectional* dan desain kausal. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah simple random sampling dan jumlah sampel penelitian sebanyak 510 orang dari kepala keluarga penerima beras miskin. Selanjutnya teknik analisa data yang digunakan adalah (1) uji mean (2) uji Poverty Gap Index, (3) uji *Distributionally Sensitive Index*.

Hasil penelitian ternyata rata-rata tingkat pendapatan masyarakat miskin di desa sebesar Rp.1.593.575/bulan. Tingkat pengeluaran sebesar Rp. 242.575/kapita/bulan. Tingkat kemiskinan bagi masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk dalam kategori miskin. Tingkat ketimpangan dan sebaran kemiskinan bagi masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai Poverty Gap Index sebesar 1,267 dan rata-rata nilai *Distributionally Sensitive Index* sebesar 0,236

Kata Kunci : Kemiskinan, Pendapatan, ketimpangan, Sebaran

Pendahuluan

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu persoalan pemenuhan kebutuhan pokok untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia di dalam suatu wilayah. Persoalan kemiskinan bukanlah suatu persoalan yang baru muncul saat ini tetapi persoalan kemiskinan selalu terdapat di mana saja dan kapan saja, namun yang berbeda adalah jumlah penduduk miskin, distribusi, ukuran dan kategori serta faktor-faktor penyebabnya. Sukirno (2005) mengemukakan bahwa jumlah penduduk miskin pada umumnya lebih banyak terdapat di negara-negara berkembang dan sebagian besar di antaranya termasuk dalam kategori kemiskinan absolut. Kemudian Todaro (2006) mengemukakan bahwa sebagian besar penduduk miskin di negara-negara berkembang bertempat tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian utama dari sektor pertanian.

Dalam kajian ekonomi, kemiskinan diukur dari tingkat pendapatan. Bila tingkat pendapatan yang diperoleh seseorang atau keluarga tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan pokok hidupnya, maka yang bersangkutan digolongkan miskin. Penentuan tingkat pendapatan seseorang tergolong miskin atau tidak miskin ditetapkan berdasarkan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (*poverty line*) adalah batas tingkat kemampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi standar kebutuhan hidup pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Garis kemiskinan ini ditetapkan berdasarkan perbandingan tingkat pendapatan per kapita per tahun atau perbulan dengan tingkat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak.

Dalam menentukan garis kemiskinan, para ahli dan lembaga terkait menetapkan berdasarkan pendekatan yang digunakannya dalam memahami kemiskinan itu sendiri. Secara umum, ada dua pendekatan yang sering dipergunakan oleh para ahli dan lembaga terkait dalam memahami konsep kemiskinan yaitu pendekatan kebutuhan dasar (pendekatan biologis) dan pendekatan ketimpangan. Pendekatan kebutuhan dasar (pendekatan biologis) menekankan pengukuran



kemiskinan terfokus pada tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Sedangkan pendekatan ketimpangan tidak lagi uhan dasar yang wajib terpenuhi tetapi lebih tertuju pada pengkajian terhadap perbedaan tingkat kehidupan antara mereka yang berada di bawah dengan mereka yang lebih makmur atau lebih sejahtera.

Penentuan ukuran kemiskinan dengan pendekatan biologis juga masih banyak terjadi perbedaan pendapat terhadap dasar dan teknik pengukurannya. Ada sebagian pendapat mengusulkan berdasarkan jumlah pendapatan per tahun dan ada juga berdasarkan jumlah pengeluaran per kapita. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketentuan yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik (2012) dalam menetapkan tingkat kemiskinan bagi masyarakat desa yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Inilah yang menjadi latar belakang peneliti untuk mengajukan topik makalah ini yang berjudul "Statistik dan Pengukuran Kemiskinan Di Kabupaten Tapanuli Selatan

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah teknik mengukur kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimanakah teknik mengukur tingkat ketimpangan kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan ?
3. Bagaimanakah teknik mengukur tingkat sebaran kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan ?

Tujuan

Sesuai rumusan masalah yang ditetapkan, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah :

1. Untuk mengetahui teknik mengukur kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Untuk mengetahui gambaran kategori tingkat kemiskinan masyarakat desa

yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan

3. Untuk mengetahui teknik mengukur tingkat ketimpangan kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan
5. Untuk mengetahui teknik mengukur tingkat sebaran kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan
6. Untuk mengetahui tingkat sebaran kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan

Tinjauan Teoritis

Konsep Dasar Kemiskinan.

Dalam memahami konsep kemiskinan, para ahli dan beberapa lembaga menggunakan beberapa pendekatan sesuai dengan bidang kajiannya. Munculnya beberapa pendekatan dimaksud disebabkan oleh dimensi kemiskinan yang sangat kompleks sehingga pendekatan yang digunakan juga bisa berbeda sesuai dengan bidang kajiannya. Dengan pendekatan yang berbeda-beda, maka para ahli dan berbagai lembaga telah banyak mengemukakan pengertian kemiskinan menurut pendekatan yang digunakannya.

Menurut Sutikno (2009), kemiskinan adalah sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu, keluarga atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya. Definisi tersebut di atas sejalan dengan pendapat Daulay (2009), Sayogyo (1974) dan Mubyarto (1997). Menurut Sumodiningrat (1998), kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Definisi tersebut di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arsyad (2004).

Teknik Perhitungan Garis Kemiskinan

Untuk menentukan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan dasar, ada dua cara yang umum digunakan yaitu metode *food energy intake* (FEI) dan metode biaya kebutuhan dasar (*cost of basic needs/CBN*). Kedua metode di atas sama-sama didasarkan pada konsumsi makanan dan non makanan penduduk. Perbedaan kedua metode di atas, metode CBN mengasumsikan bahwa nilai kuantitas setiap komoditas makanan yang terpilih adalah tetap (*fixed bundle*). Setiap tahun harga bundle tersebut dihitung untuk masing-masing daerah dan ditambah dengan alokasi kebutuhan minimum non makanan untuk mendapatkan garis kemiskinan. Sebaliknya metode FEI mengasumsikan nilai kuantitas dan harga komoditas yang terpilih selalu berubah sesuai dengan perubahan pola konsumsi dari penduduk itu sendiri.

Biro Pusat Statistik (2012) menggunakan metode *food energy intake* (FEI). Alasan pemilihan metode ini adalah ketika pendapatan atau pengeluaran naik, maka konsumsi energy juga akan naik. Dengan menggunakan metode ini, kemiskinan dipandang sebagai suatu kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, menurut Biro Pusat Statistik (2012) bahwa garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan jumlah pengeluaran per kapita per bulan baik untuk pengeluaran kebutuhan makanan maupun non makanan.

Berdasarkan uraian di atas, garis kemiskinan (GK) merupakan hasil penjumlahan antara garis kemiskinan untuk kebutuhan pangan (GKP) dengan garis kemiskinan untuk kebutuhan non pangan (GKNP) dan ringkasnya dapat dirumuskan $GK = GKP + GKNP$. Yang dimaksud dengan GKP adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditas dasar pangan (paket komoditi) yang riil dikonsumsi oleh penduduk referensi. Nilai pengeluaran dari paket komoditi tersebut kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.

Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum pangan dilakukan

dengan cara menghitung harga rata-rata kalori dari 52 komoditas pangan yang ditetapkan. Formulasi yang digunakan untuk menghitung garis kemiskinan pangan (GKP) adalah :

$$GKP_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{kjp} Q_{kjp} - \sum_{k=1}^{52} V_{kjp}$$

Keterangan :

GKP_{jp} = garis kemiskinan pangan daerah “ j ” (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) propinsi “ p ”.

P_{kjp} = harga komoditas “ k ” di daerah “ j ” dan propinsi “ p ”

Q_{kjp} = rata-rata kuantitas komoditas “ k ” yang dikonsumsi di daerah “ j ” dan propinsi “ p ”

V_{kjp} = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditas “ k ” di daerah “ j ” dan propinsi “ p ”

j = daerah (perkotaan/perdesaan)

p = propinsi ke “ p ”

k = komoditas pangan

Harga implisit rata-rata kalori di daerah “ j ” propinsi “ p ” dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\overline{HK}_{JP} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{kjp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{kjp}}$$

Keterangan :

$\overline{HK}_{JP}$ = harga rata-rata kalori di daerah “ j ” propinsi “ p ”

K_{kjp} = kalori dari komoditas “ k ” di daerah “ j ” propinsi “ p ”

V_{kjp} = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditas “ k ” di daerah “ j ” dan propinsi “ p ”

Selanjutnya yang dimaksud dengan garis kemiskinan non pangan (GKNP) adalah penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non pangan terpilih yang meliputi perumahan,



sandang, pendidikan dan kesehatan. Secara matematis GKNP dapat diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$GKNP_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

Keterangan :

$GKNP_{jp}$ = garis kemiskinan non pangan daerah “j” propinsi “p”.

r_{kj} = rasio pengeluaran komoditi non pangan “k” menurut daerah “j”

V_{kjp} = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditas “k” di daerah “j” dan propinsi “p”.

j = daerah (perkotaan/perdesaan)

p = propinsi ke “p”

k = komoditas non pangan terpilih

Penentuan Tingkat Kemiskinan

Tingkat pendapatan keluarga miskin tidak selalu sama baik di dalam suatu wilayah atau antar wilayah. Dengan demikian, tidak selalu sama tingkat kemiskinan yang dialami oleh setiap keluarga miskin. Untuk menyikapi hal di atas, Biro Pusat Statistik (2012) telah menetapkan perhitungan tingkat kemiskinan sesuai dengan klasifikasinya. Adapun klasifikasi dan perhitungan tingkat kemiskinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sangat miskin yaitu mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di bawah $0,8 \times GK$
- Miskin yaitu mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan (GK)
- Hampir miskin yaitu mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di atas GK dan di bawah $1,2 \times GK$
- Sangat miskin yaitu mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada antara $1,2 \times GK$ dan $1,6 \times GK$

Teknik Pengukuran Tingkat Ketimpangan Kemiskinan

Tingkat ketimpangan kemiskinan (*Poverty Gap Index*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka ini memperlihatkan jurang (*gap*) antara pendapatan rata-rata yang diterima penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Sebaliknya, semakin tinggi angka ini maka semakin besar tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Untuk menghitung tingkat ketimpangan kemiskinan di dalam suatu wilayah, Biro Pusat Statistik (2012) menggunakan rumus yaitu :

$$P_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{Z - y_i}{Z} \right)$$

Keterangan :

N = Jumlah penduduk desa di kecamatan

q = Jumlah penduduk desa di bawah garis kemiskinan di kecamatan

Z = Batas garis kemiskinan yang ditetapkan

y_i = Rata-rata pengeluaran penduduk desa di bawah garis kemiskinan

Teknik Pengukuran Tingkat Sebaran Kemiskinan

Di samping pentingnya mengetahui tingkat ketimpangan kemiskinan, juga perlu diketahui tingkat sebaran kemiskinan. Tingkat sebaran kemiskinan (*Distributionally Sensitive Index*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Angka ini memperlihatkan sensitivitas distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin kecil *Distributionally Sensitive Index* (P_2) ini menunjukkan distribusi pendapatan di antara penduduk miskin semakin merata, demikian sebaliknya. Untuk mengetahui indeks sebaran kemiskinan (*distributionally sensitive index*)



atau P2, Biro Pusat Statistik (2012) menggunakan rumus yaitu :

$$P_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{Z - y_i}{Z} \right)^2$$

Keterangan :

N = Jumlah penduduk desa di kecamatan

q = Jumlah penduduk desa di bawah garis kemiskinan di kecamatan

Z = Batas garis kemiskinan yang ditetapkan

y_i = Rata-rata pengeluaran penduduk desa di bawah garis kemiskinan

Dengan menggunakan metode perhitungan *Poverty Gap Index* (P1) dan *Distributionally Sensitive Index* (P2) akan dapat diperoleh gambaran tingkat ketimpangan dan sebaran kemiskinan yang terdapat di dalam suatu wilayah atau negara. Kemudian hasil perhitungan ini sangat berguna bagi pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan terutama dalam menentukan jumlah anggaran dan alokasi pembangunan pada setiap wilayah atau daerah.

Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ada dua yakni (1) desain *cross-sectional* yaitu mempelajari objek penelitian dan sekaligus menggambarkan dan menganalisis data dari variabel-variabel yang diteliti, (2) desain kausal yaitu menganalisis bagaimana hubungan atau pengaruh variabel yang diteliti terhadap objek penelitian (Umar, 2008). Variabel yang diteliti adalah variabel yang berkaitan dengan faktor-faktor utama penyebab kemiskinan di pedesaan. Dalam kajian secara teoritis, faktor-faktor penyebab kemiskinan di pedesaan adalah pendidikan dan budaya hidup.

Adapun yang menjadi populasi penelitian adalah semua keluarga miskin penerima beras miskin di desa yang diberikan oleh pemerintah. Jumlah populasi penelitian sebanyak 19.083 KK. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah

simple random sampling dan jumlah sampel penelitian sebanyak 510 orang dari kepala keluarga miskin. Teknik pengukuran data yang digunakan adalah skala likert. Selanjutnya teknik analisa data yang digunakan adalah (1) uji mean (2) *Poverty Gap Index*, (3) *Distributionally Sensitive Index* (P2).

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Pendapatan Keluarga Miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan

Tingkat pendapatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jumlah penghasilan yang diperoleh semua anggota keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, ternyata rata-rata tingkat pendapatan responden dari keluarga miskin masing-masing kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan hanya sebesar Rp. 1.594.927 per bulan. Rata-rata jumlah tenaga kerja dari keluarga miskin yang ikut bekerja setiap hari sebanyak 3,22 orang. Bila dihitung perbandingan rata-rata tingkat pendapatan keluarga miskin dengan rata-rata jumlah tenaga kerja keluarga miskin maka rata-rata tingkat pendapatan tenaga kerja dari keluarga miskin hanya sebesar Rp. 531.664,30/orang/bulan.

Tingkat Pengeluaran Keluarga Miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan

Sumber pengeluaran anggota keluarga adalah pendapatan keluarga yang diperoleh dari berbagai aktivitas sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, rata-rata tingkat pengeluaran keluarga miskin sama dengan tingkat pendapatannya yakni sebesar Rp. 1.594.927 per bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa semua pendapatan keluarga miskin habis dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga setiap bulan. Dengan demikian keluarga miskin sangat terbatas kesempatannya untuk menabung atau menambah modal sehingga terbatas pula kesempatan mereka untuk meningkatkan pendapatan.



Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan

BPS (2012) telah menetapkan kategori kemiskinan di Indonesia yaitu : (a). Kategori miskin yakni seseorang atau keluarga masuk dalam kategori miskin apabila tingkat pengeluaran per kapita per bulan berada antara Rp. 207.616 – Rp. 259.520, (b). Kategori sangat miskin yakni seseorang atau keluarga masuk dalam kategori sangat miskin apabila tingkat pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah 0,8 x garis kemiskinan. Dengan demikian seseorang atau keluarga masuk dalam kategori sangat miskin apabila tingkat pengeluaran berada di bawah Rp. 207.616 per kapita per bulan. Bila diperhatikan rata-rata jumlah pengeluaran keluarga miskin sebesar Rp. 242.534/kapita/bulan, maka dapat disimpulkan tingkat kemiskinan bagi masyarakat desa yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk dalam kategori miskin.

Tingkat Ketimpangan Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan persamaan *Poverty Gap Index* (P_1) ternyata rata-rata tingkat ketimpangan kemiskinan bagi masyarakat desa yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 1,267. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antara rata-rata tingkat pengeluaran keluarga miskin dengan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik (2012) tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat secara nyata selisih dari rata-rata jumlah pengeluaran responden yang tergolong miskin (Rp. 242.575/orang/bulan) dengan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS (Rp. 259.520/orang/bulan). Dari perbandingan antara rata-rata tingkat pengeluaran responden dari keluarga miskin dengan garis kemiskinan diperoleh selisih hanya sebesar Rp. 16.945 /orang/bulan.

Tingkat Sebaran Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan persamaan *Distributionally Sensitive Index* (P_2) ternyata rata-rata tingkat sebaran kemiskinan bagi masyarakat desa yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 0,236. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat distribusi pengeluaran antar penduduk miskin di desa yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan juga tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.16 di mana rata-rata jumlah pengeluaran per kapita keluarga miskin terendah sebesar RP. 220.524/orang/bulan dan tertinggi sebesar Rp. 251.023/orang/bulan. Dari data tersebut terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran per kapita keluarga miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan hanya sebesar Rp. 40.499/orang/bulan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data serta pembahasan , maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu :

- a. Keluarga miskin sangat terbatas kesempatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan karena rata-rata tingkat pendapatan keluarga miskin sama dengan tingkat.
- b. Pengeluaran sehingga terbatas kesempatan untuk menabung
- c. Tingkat kemiskinan bagi masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk dalam kategori miskin
- d. Tingkat ketimpangan kemiskinan bagi masyarakat desa di di Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk rendah
- e. Tingkat sebaran kemiskinan bagi masyarakat desa di di Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk rendah

Saran

- a. Penyusunan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan harus disesuaikan dengan tingkat kemiskinan dan faktor-faktor penyebab utama timbulnya kemiskinan.



- b. Pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur antara wilayah perkotaan dengan pedesaan agar terwujud pemerataan pembangunan dan tingkat kehidupan masyarakat antara wilayah perkotaan dengan pedesaan.
- c. Program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan berbentuk barang hendaknya dapat dikurangi dan harus lebih banyak diarahkan kepada upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad L. 2004 : Ekonomi Pembangunan, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, 2012, Tapanuli Selatan Dalam Angka tahun 2012, Padangsidimpuan
- Biro Pusat Staistik, 2012 : Kerangka Pikir dan Spektrum Pelaksanaan Tugas Statistik Ketahanan Sosial, Yogyakarta.
- Bappenas, 2008 : Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009, Jakarta.
- Daulay, M. 2009 : Kemiskinan Pedesaan, USU Press, Medan.
- Jhingan ML, 2000 : Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajat. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jogjakarta: BPFE-UGM
- Miraza H. Bachtiar dkk, 2010 : Pembangunan Pedesaan ; Teori dan Praktek, USU Press, Medan
- Mubyarto, 1997 : Peran wanita Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia, Majalah Perencanaan Pembangunan, Nomor 08/Mei
- Nasution, Anwar. 2011 : Panduan Penanggulangan Kemiskinan, TNP2K, Jakarta.
- Sajogyo. 1977. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Bogor: LPSP-IPB.
- Sumodiningrat, G. 1998 : Membangun Perekonomian Rakyat, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Sukirno S. 2005 : Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, FE-UI, Jakarta
- Sutikno, dkk. 2009. Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Sistem, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.11 No.1 Juni 2010:135*.
- Todaro, M.P ,2006 : Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, PT. Erlangga, Jakarta
- Umar Husein, 2008 : Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.